

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang berjudul “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik penelitian berupa studi literatur, studi wawancara, dan studi dokumentasi.

Begitu pula dalam penelitian ini penulis sebagai instrumen utama yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik pengumpulan data. Mengenai metodologi penelitian lebih jelas akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Pendekatan, Metode, dan Teknik Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Nasution (1996:5) mengemukakan bahwa: “penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Demikian pula menurut Moleong (2000) menyebutkan bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahan” (Moleong, 2000: 3). Penelitian ini menurut Naustion (1996: 18) disebut juga dengan penelitian naturalistik. Dapat disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat pengukur. Dapat disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.

Oleh karena data yang akan diperoleh dari penelitian ini bersifat kualitatif berupa deskripsi tentang suatu peristiwa. Maka, dibutuhkan ketelitian dari peneliti untuk dapat mengamati secermat mungkin aspek-aspek yang diteliti. Dari hal itu terlihat di sini bahwa peranan peneliti sangat menentukan sebagai alat penelitian utama yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara terstruktur dalam hal ini Nasution (2007) mengemukakan bahwa:

“Hanya manusia sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden. Walaupun digunakan alat rekam atau kamera, peneliti tetap memegang peran utama sebagai alat penelitian” (Nasution, 2007: 9).

Dalam mempertajam analisis maka penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penulisan ini. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dengan meminjam konsep pada ilmu-ilmu sosial lain seperti politik dan sosiologi. Konsep yang dipinjam dari ilmu politik seperti pemerintahan,

T. Bahagia Kesuma, 2012

undang-undang, provinsi, negara, daerah, otonomi dan lain-lain. Sedangkan sosiologi seperti, dinamika, masyarakat, perubahan sosial dan lain-lain.

Penggunaan berbagai konsep ilmu sosial sangatlah relevan bagi seorang peneliti seperti yang diungkapkan Sjamsuddin (2007) mengemukakan bahwa:

“Penggunaan berbagai konsep disiplin ilmu sosial lain ini memungkinkan suatu masalah dapat dilihat dari berbagai dimensi sehingga pemahaman tentang masalah yang akan dibahas baik keluasaan maupun kedalamannya semakin jelas. Seperti halnya fakta-fakta dengan sendirinya para sejarawan dapat pula memanfaatkan konsep-konsep yang relevan untuk membantu mereka dalam metodologi dan analisis-analisis historiografi mereka” (Sjamsuddin, 2007: 41).

Metode yang digunakan adalah metode historis. Metode historis menurut Gottschalk, (1975: 32), “proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampu dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut historiografi”.

Pendapat lain mengenai metode historis diungkapkan di buku Metodologi Sejarah yang ditulis oleh Sjamsuddin (2007: 63) mengatakan bahwa metode historis adalah “suatu pengkajian pejelasan dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau”. Selanjutnya Widja (1998: 19) menyatakan bahwa “sejarah terutama yang berkaitan dengan kejadian masa lampau dari manusia, tetapi tidak semua kejadian ini bisa diungkapkan, sehingga studi tentang sejarah sebenarnya dianggap bukan sebagai studi masa lampau itu sendiri, tetapi studi tentang jejak-jejak dari peristiwa masa lampau”.

Defenisi yang telah diungkapkan diatas dikuatkan oleh ungkapan Surakhmad (1985) yang mengemukakan bahwa:

T. Bahagia Kesuma, 2012

“Metode historis adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang” (Surakhmad, 1985: 132).

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode historis dapat digunakan dan sesuai karena cocok dengan data dan fakta yang diperlukan yang berasal dari masa lampau.

Menurut Ismaun (2005: 34), langkah-langkah metode historis terdiri atas:

1. *Heuristik*, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan (Ismaun, 2005: 49). Secara sederhana, sumber-sumber sejarah itu dapat berupa: sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan. Secara lebih luas lagi, sumber sejarah juga dapat dibeda-bedakan ke dalam sumber formal dan informal. Selain itu, dapat diklasifikasikan dalam sumber primer dan sekunder. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan fakta dan data tentang *Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”*. Proses pencarian data dan fakta tersebut peneliti tempuh dengan cara mencari buku-buku yang sesuai dengan tema yang peneliti angkat di beberapa perpustakaan universitas maupun toko-toko buku yang ada di kota Bandung, kantor Menkopolhunkam dan sumber internet yang berkaitan dengan judul tersebut.

2. *Kritik*, yaitu suatu usaha menilai sumber-sumber sejarah (Ismaun, 2005: 50). Semua sumber dipilih melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Fungsi dari proses ini adalah untuk mengetahui apakah sumber-sumber yang diperoleh itu relevan atau tidak dengan permasalahan yang dikaji, yakni mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Dalam tahap ini kritik sumber terdapat dua macam, yaitu:

- a. Kritik ekstern atau kritik luar, yakni untuk menilai otentitas sumber sejarah. Sumber otentik tidak mesti harus sama dengan sumber aslinya, baik menurut isinya yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi sumber otentik bisa juga salinan atau turunan dari aslinya. Dokumen otentik isinya tidak boleh dipalsukan, tetapi otentisitasnya belum tentu memberi jaminan untuk dapat dipercaya. Dalam kritik ekstern dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas nama siapa. Sumber itu asli atau salinan dan masih utuh seluruhnya atau sudah berubah.
- b. Kritik intern atau kritik dalam, yakni untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, maupun pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Isinya dinilai dengan membandingkan

kesaksian-kesaksian di dalam sumber dengan kesaksian-kesaksian dari sumber lain. Untuk menguji kredibilitas sumber diadakan penilaian instrinsik terhadap sumber dengan mempersoalkan hal-hal tersebut. Kemudian dipunguti fakta-fakta sejarah melalui perumusan data yang didapat, setelah diadakan penelitian terhadap evidensi-evidensi dalam sumber. Pada bagian ini peneliti mencoba untuk menganalisis dan melakukan perbandingan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dari beberapa buku untuk selanjutnya dicari suatu hubungan fakta-fakta yang telah dianalisis dan dibandingkan menjadi suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tema yang peneliti angkat.

3. *Interpretasi*, yaitu sebagai usaha memahami dan mencari hubungan antar fakta sejarah sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan rasional. Satu pendapat dihubungkan dengan pendapat lain. Sehingga dapat menciptakan keselarasan penafsiran yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji tentang Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”.
4. *Historiografi*, yaitu proses penyusunan hasil penelitian yang telah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk skripsi, sehingga dihasilkan suatu tulisan yang logis dan sistematis, dengan demikian akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti berusaha

mengajukan sebuah bentuk laporan penelitian penulisan sejarah yang berjudul “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006” sehingga menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh.

Ada enam langkah dalam metode historis Sjamsuddin (2007: 89) mengemukakan, yaitu:

1. Memilih topik yang sesuai;
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik;
3. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung (misalnya dengan menggunakan *system cards*);
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber);
5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya; dan
6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti dengan se jelas mungkin.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2003: 89) bahwa dalam melaksanakan penelitian sejarah terdapat lima tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

1. Pemilihan topik;
2. Pengumpulan sumber;
3. Verifikasi (kritik sejarah atau keabsahan sumber);
4. Interpretasi : analisis dan sintesis; dan
5. Penulisan.

Berdasarkan pendapat diatas, pada dasarnya terdapat suatu kesamaan dalam metode historis yaitu pada umumnya langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis adalah mengumpulkan sumber, menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Studi kepustakaan yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca dan mengkaji sejumlah literatur yang berupa arsip-arsip, buku-buku, jurnal, surat kabar serta artikel yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Sehingga mendapatkan informasi-informasi yang dikaji yaitu mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-

T. Bahagia Kesuma, 2012

2006”. Berkaitan dengan ini, dilakukan kegiatan kunjungan pada perpustakaan UPI, perpustakaan asrama teuku Umar Cicendo (Juli 2011) yang mendukung penulisan ini. Setelah literatur terkumpul dan cukup relevan sebagai acuan penulisan maka penulis mulai mempelajari, mengkaji, dan mengidentifikasi. Selanjutnya penulis memilih sumber yang relevan dan dapat dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis melakukan teknik wawancara yang digunakan erat kaitannya dengan sejarah lisan (*oral history*). Seperti yang diungkapkan Sjamsudin (2007:102) “Sejarah lisan merupakan ingatan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancarai sejarawan”.

Menurut Kuntowidjono (1998: 23) “Teknik wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lisan dari narasumber sebagai pelengkap dari sumber tertulis” Penggunaan teknik wawancara dalam memperoleh data dilakukan dengan pertimbangan bahwa pelaku benar-benar mengalami sendiri peristiwa yang terjadi di masa lampau, khususnya mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Dengan demikian penggunaan teknik wawancara sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai peristiwa yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Akan tetapi, sebelum melakukan wawancara penulis membuat daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh para pelaku atau saksi.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara gabungan antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara atau kuosioner lisan merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1996: 73) bahwa, “Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi”.

Wawancara terstruktur atau berencana yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua responden yang ditanya untuk diwawancara diajukan pertanyaan yang sama dengan kata-kata dan tata urutan yang seragam. Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada orang yang langsung berhubungan dengan peristiwa, pelaku atau saksi dalam suatu peristiwa kesejarahan yang diteliti yaitu Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian terhadap Kondisi Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Wawancara sebagai teknik untuk memperoleh data berdasarkan pertimbangan bahwa periode yang menjadi bahan kajian dalam penulisan ini masih memungkinkan didapatkannya sumber lisan Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah:

T. Bahagia Kesuma, 2012

“Sebuah Kajian terhadap Kondisi Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”.

Selain itu, narasumber (pelaku atau saksi) mengalami, melihat dan merasakan sendiri peristiwa di masa lampau yang menjadi objek kajian sehingga sumber yang diperoleh lebih objektif. Teknik wawancara yang digunakan erat kaitannya dengan sejarah lisan (oral history). “Sejarah lisan merupakan ingatan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancarai sejarawan” (Sjamsuddin, 2007: 102). Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya ditanyakan secara spontan sehingga tidak memerlukan suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata dan tata urutan yang harus dipatuhi peneliti. Kebaikan dari penggabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur adalah tujuan wawancara lebih terfokus. Data yang diperoleh lebih mudah diolah dan narasumber lebih bebas mengungkapkan peristiwa masa lampau yang diketahuinya.

Wawancara yang dilakukan penulis, menggunakan teknik wawancara gabungan antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur atau berencana yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua responden yang ditanya untuk diwawancarai diajukan pertanyaan yang sama dengan kata-kata dan tata urutan yang seragam. Melalui wawancara terstruktur penulis membuat susunan pertanyaan yang sudah dibuat untuk ditanyakan kepada pelaku atau saksi sejarah yang berkaitan dengan skripsi. Kemudian diikuti dengan wawancara tidak

T. Bahagia Kesuma, 2012

terstruktur yaitu penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan sebelumnya dengan tujuan untuk mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang berkembang kepada pelaku atau saksi sejarah.

Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada orang yang langsung berhubungan dengan peristiwa, pelaku atau saksi dalam proses dinamika hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Aceh). Penggunaan wawancara sebagai teknik untuk memperoleh data berdasarkan pertimbangan bahwa periode yang menjadi bahan kajian dalam penulisan ini masih memungkinkan didapatkannya sumber lisan yaitu mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Selain itu, narasumber (pelaku atau saksi) mengalami, melihat dan merasakan sendiri peristiwa di masa lampau yang menjadi objek kajian sehingga sumber yang diperoleh diharapkan dapat lebih objektif.

Narasumber yang diwawancarai diantaranya Bapak Sayed Fuad Zakaria dan Nasir Djamil selaku Anggota DPR RI (2009-2014), Bapak T. Ali Basyah Talsya (Sejarawan dan budayawan Aceh), Bapak Wagimin (mantan anggota BRR NAD), Bapak T. Iwan Kesuma (tokoh masyarakat Aceh), Abdullah Puteh (Mantan Gubernur Aceh), Badruzzaman (ketua MAA), Teuku Kamaruzzaman (juru runding GAM), Kamal A.Arif, Rusli Ghalib, Said Aziz, T.M Ariadi, Zulkifli Zaini, M Daud Nurdin dan narasumber lainnya. Para narasumber ini tidak semuanya di wawancarai secara langsung bertatap muka, tetapi ada yang melalui

T. Bahagia Kesuma, 2012

email, sms dan telepon. Hal ini disebabkan karena kesibukan para narasumber. Selain itu jarak juga menjadi penghalang antara peneliti dan nara sumber untuk bertatap muka secara langsung.

Selain kedua teknis di atas, penulis juga menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Studi dokumentasi guna menunjang perolehan data dan informasi dari lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini merupakan pengkajian atas dokumen-dokumen seperti data arsip koran, foto-foto yang dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan.

Menurut Moleong (2004) berkaitan dengan penggunaan dokumen di dalam suatu penelitian sebagai sumber data, beliau mengemukakan bahwa:

“Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, dalam banyak hal dokumen dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya” (Moleong, 2004: 217).

Teknik ini sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menginterpretasikan, bahkan untuk memprediksikan. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat, menganalisa data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dan menunjang penelitian. Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap arsip-arsip yang telah ditemukan berupa arsip mengenai status penyelenggaraan kesetimewaan Aceh, pemberian otonomi khusus Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh. Selain itu sumber yang berasal dari koran-koran pada masa 1999-2006 yang dapat memberikan

T. Bahagia Kesuma, 2012

penjelasan dan pemahaman mengenai “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mencoba menjelaskan beberapa langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menjadi karya tulis ilmiah yang sesuai dengan tuntutan keilmuan. Langkah-langkah yang dilakukan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Ketiga tahap penelitian tersebut akan lebih dijabarkan di bawah ini sebagai berikut:

3.2. Prosedur Penelitian

3.2.1. Persiapan Penelitian

Dalam tahap persiapan ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Diantaranya adalah langkah-langkah berikut:

3.2.1.1. Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian

Langkah-langkah yang peneliti lakukan pada tahap ini adalah mengajukan rancangan judul penelitian kepada dewan yang secara khusus menangani penulisan skripsi di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, yaitu Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS). Judul yang peneliti ajukan adalah “Hubungan Aceh dan Pemerintahan Pusat Sebuah Pasang Surut Ditinjau dari

T. Bahagia Kesuma, 2012

Sudut Perubahan Bentuk Pemerintahan 1948-2006”. Setelah Seminar Pra-Rancangan Penulisan Skripsi, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah dan mendapat masukan dari Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) dan calon pembimbing, peneliti mendapatkan saran untuk merubah perodesasi yang sebelumnya menjadi “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006” dengan alasan bahwa peneliti akan kesulitan dalam membahas pembahasan tersebut karena dalam periode tersebut begitu banyak perubahan dan peristiwa yang terjadi di Aceh seperti masalah dimasukkannya Aceh kedalam keresidenan Sumatera Timur, DI TII, peristiwa cumbok, dan lain-lain. Begitu banyak kajian yang harus dibahas di dalam judul ini menyebabkan terjadinya perubahan kembali judul menjadi “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah : “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”

Pengesahan penelitian dikeluarkan melalui surat keputusan dari Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Jurusan Pendidikan Sejarah No: 087 / TPPS/ JPS/ 2010. Setelah disetujui, pengesahan untuk penulisan skripsi dikeluarkan melalui Surat Keputusan Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan sekaligus penentuan pembimbing skripsi pada 9 November 2010, yaitu Bapak H. Didin Saripudin, M. Si., Ph.D. (sebagai Pembimbing I) dan Ibu Farida

T. Bahagia Kesuma, 2012

Sarimaya, S.Pd., M.Si. (sebagai Pembimbing II). Dalam proposal penelitian yang diajukan tersebut memuat tentang:

- a. Judul Penelitian;
- b. Latar Belakang Masalah;
- c. Rumusan dan Pembatasan Masalah;
- d. Tujuan Penelitian;
- e. Manfaat Penelitian;
- f. Tinjauan kepustakaan;
- g. Metode dan Teknik Penulisan; dan
- h. Sistematika Penulisan.

3.2.1.2. Proses Bimbingan

Selama proses konsultasi awal, selain mengenai prosedur bimbingan, peneliti juga mendapatkan masukan mengenai substansi skripsi, baik dari Pembimbing I maupun Pembimbing II. Konsultasi biasanya dimulai mengenai perubahan judul dan fokus permasalahan yang dihadapi dalam setiap bab isi dari skripsi ini. Jadwal konsultasi bersifat bebas dan setiap pertemuan membahas satu atau dua bab bagian skripsi dan revisi yang telah diserahkan kepada pembimbing untuk selanjutnya dibaca setelah dibaca oleh pembimbing pertemuan selanjutnya diberi masukan oleh pembimbing. Selain itu konsultasi mengenai sumber dan hal-hal yang menjadi kendala selama penulisan skripsi ini. Konsultasi satu bab biasanya tidak cukup satu kali bimbingan karena ada kekurangan yang harus

T. Bahagia Kesuma, 2012

ditambah, dikurangi ataupun diperbaiki oleh peneliti. Konsultasi terus dilaksanakan sampai semua bab selesai dan penulisannya benar.

3.2.2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan faktor yang penting dari rangkaian proses penelitian dalam rangka mendapatkan data dan fakta yang dibutuhkan. Pada tahap ini penulisan menempuh beberapa tahapan antara lain:

3.2.2.1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik merupakan langkah paling awal yang dilakukan penulisan ketika melakukan penelitian yang meliputi tahap pencarian dan pengumpulan sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Samsuddin (2007: 86) mengatakan bahwa “Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah”. Dalam proses pengumpulan sumber, lebih dititik beratkan pada sumber lisan karena minimnya sumber tertulis yang menulis secara khusus mengenai permasalahan yang dikaji karena peristiwa yang dikaji merupakan kejadian kontemporer. Meskipun begitu penggunaan sumber tertulis dilakukan untuk membantu, mempermudah analisis dan menambak informasi dalam penulisan ini. Mengenai sumber sejarah menurut Samsuddin (2007) mengemukakan bahwa :

“Semua “saksi mata” disebut sumber-sumber sejarah (*historical sources*). Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (*past actuality*) disebut sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (*raw materials*). Sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata

T. Bahagia Kesuma, 2012

yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan)” (Sjamsuddin, 2007:95).

Demi pemaparan mengenai tahapan pengumpulan sumber sejarah yang digunakan oleh penulis yang lebih jelasnya akan dijelaskan berikut ini :

3.2.2.1.1. Pengumpulan Sumber Tertulis

Pada tahap ini penulis berusaha mencari data yang diperlukan sebagai sumber dalam penelitian dengan menggunakan studi dokumenter. Sumber tersebut berupa buku-buku, kumpulan arsip yang sudah dibukukan, buku yang berupa hasil dialog, jurnal ilmiah maupun karya tulis ilmiah yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam pelaksanaan pengumpulan sumber tertulis ini penulis mengalami sedikit kendala karena skripsi yang ditulis merupakan sejarah kontemporer dan judulnya berhubungan dengan situasi masyarakat di Provinsi Aceh karena penulis berada di Bandung sehingga untuk informasi awal penulis mengadakan kunjungan ke toko buku BBC Palasari, penulis mendapatkan beberapa buku yang berkaitan dengan skripsi yaitu buku karya Ferry Mursidan Baldan berjudul *Pondasi Menuju Perdamaian; Catatan Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh* (2007) yang diterbitkan oleh Suara Bebas, buku karya Nordholt, H.S dan Klinken (2007). Yang berjudul *Politik Lokal di Indonesia* (2007) diterbitkan oleh Obor. buku karya Indra Jaya Piliang yang berjudul *Bouraq-Singa Kontra Garuda : Pengaruh Sistem Lambang dalam Separatisme GAM terhadap RI* (2010) diterbitkan oleh Ombak. Buku karya Anthony Reid yang berjudul *Asal Mula Konflik Aceh* (2006) yang diterbitkan oleh Obor. buku karya Agussalim Gadjong buku yang berjudul

T. Bahagia Kesuma, 2012

Pemerintahan Daerah (2007) diterbitkan oleh Galia Indonesia. Buku karya Irtanto yang berjudul *Dinamika Politik Lokal era Otonomi Daerah* (2006) yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar.

Penulis juga mendapatkan sumbangan buku yang sangat berharga yang dapat memberikan gambaran situasi Aceh pada masa 199-2006 dari mantan anggota BRR NAD-NIAS yaitu bapak Wagimin buku yang dikeluarkan oleh BRR NAD-NIAS yang berjudul *Dinamika Serambi Mekah di masa depan*. (2006), buku yang dikeluarkan oleh BRR NAD-NIAS buku berjudul *Duek Bersama Membangun Aceh Baru* (2006), buku yang dikeluarkan oleh BRR NAD-NIAS buku yang berjudul *Pemberdayaan Siskamling dalam implementasi MoU Helsinki dan Propinsi NAD*(2006), buku yang dikeluarkan oleh BRR NAD-NIAS buku yang berjudul *Memelihara Perdamaian dan Membangun Aceh Pasca Tsunami* (2006), buku yang dikeluarkan oleh BRR NAD-NIAS *Dialog Publik : Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat di Provinsi NAD*.

Penulis juga mengunjungi perpustakaan UPI, penulis menemukan buku karya Abu Daud Busroh *Ilmu Negara*(2009 yang diterbitkan oleh Bumi Aksara. Buku karya Depdikbud. *Sejarah Derah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (1978) yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Buku karya Islamy yang berjudul *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (1994) yang diterbitkan oleh Bumi Aksara. Buku karya Ismail yang berjudul *Tantangan dan Rongrongan terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa; Kasus Darul Islam di Aceh* (1994) yang diterbitkan oleh Dwi Jaya Karya. Buku karya Harry Kawilarang yang berjudul *Aceh dari Sultan*

T. Bahagia Kesuma, 2012

Iskandar Muda ke Helsinki (2008). Yang diterbitkan Bandar Publishing. Buku karya N. Sjamsuddin yang berjudul *Revolusi di Serambi Mekah* (1999) yang diterbitkan oleh UI Press. Buku karya Inu Kencana Syafii yang berjudul *Manajemen Pemerintahan* (1998) yang diterbitkan oleh PT. Pertja. Buku karya Samidjo yang berjudul *Ilmu Negara* (1986) yang diterbitkan oleh Armico.

Perpustakaan Asrama Teuku Umar Cicendo mendapatkan buku karya Ali Hasjmy dan kawan-kawan yang berjudul *50 Tahun Aceh Membangun* (1995). Yang diterbitkan oleh Bali Medan dan majalah warta Kamaba edisi 08 Tahun xxx Oktober-Desember 2010.

Selain itu juga penulis mengumpulkan sumber dari arsip koran yang sejamin seperti arsip koran Tempo. Data yang diperoleh oleh penulis antara lain berjudul *Tembaklah Hati, Jangan Tubuhnya* yang ditulis Purwani D. Prabandari pada tanggal 18 Agustus 2003, Menko Polkam: *Faktor Pemilu Tentukan Status Aceh* pada 14 Oktober 2003 yang ditulis oleh Yura Syahrul, yang ditulis oleh Todung Mulya Lubis pendiri Center For Electoral Reform (CETRO) di koran Tempo 05 Januari 2004 yang berjudul *Aceh, Darurat Militer dan Pemilu*, LSM : *Darurat Sipil Diganti Darurat Bencana Nasional Saja* ditulis Kamis 30 Desember 2004 oleh Ewo Raswa, *Laporan Khusus Tempo Edisi 23/03-8/Agustus/1998* Membuat Satu Artikel Yang Berjudul *The Killing Field* di Aceh dan lain-lain.

3.2.2.1.2. Pengumpulan Sumber Lisan

Dalam pengumpulan sumber lisan, dimulai dengan mencari nara sumber yang relevan agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan

T. Bahagia Kesuma, 2012

yang dikaji melalui teknik wawancara. Dalam hal ini penulis mencari narasumber (saksi atau pelaku) melalui pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan yang didasarkan pada faktor dan fisik (kesehatan), perilaku (kejujuran) serta kelompok usia yaitu umur yang cocok, tepat dan memadai.

Narasumber yang diwawancarai adalah mereka yang benar-benar melihat dan mengalami kejadian tersebut. Narasumber ini dikategorikan menjadi dua, yaitu pelaku dan saksi. Pelaku adalah mereka yang benar-benar mengalami peristiwa atau kejadian yang menjadi bahan kajian. Sedangkan saksi adalah mereka yang melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Narasumber yang diwawancarai diantaranya Bapak Sayed Fuad Zakaria dan Bapak Nasir Djamil selaku Anggota DPR RI (2009-2014), Bapak T. Ali Basyah Talsya (Sejarawan dan budayawan Aceh). Bapak Wagimin (asistem menkopolkam dan mantan anggota BRR NAD), Bapak T. Iwan Kesuma (tokoh masyarakat Aceh), Bapak Abdullah Puteh (Mantan Gubernur Aceh) dan Bapak Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh), Bapak Badruzzaman (ketua MAA), Bapak Teuku Kamaruzzaman (juru runding GAM), Bapak Kamal A. Arif, Bapak Rusli Ghalib, Bapak Said Aziz, Bapak T.M Ariadi, Bapak Zulkifli Zaini, Bapak M Daud Nurdin dan narasumber lainnya.

Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang telah dibuat kepada nara sumber melalui email setelah pertanyaan itu diterima oleh narasumber kemudian pertanyaan itu di isi oleh para

narasumber dan dikirim kembali kepada penulis. Hal ini disebabkan oleh jarak dan waktu yang tidak memungkinkan untuk mewawancarai langsung narasumber.

3.2.2.2. Kritik Sumber

Langkah kedua setelah melakukan heuristik adalah melakukan kritik sumber. Dalam tahap ini data-data yang telah diperoleh berupa sumber tertulis maupun sumber lisan disaring dan dipilih untuk menilai dan menyelidiki kesesuaian sumber. Sehingga karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan hasil suatu fantasi, manipulasi atau fabrikasi sejarawan. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama, kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal (Sjamsuddin, 2007: 132).

Dalam tahap ini, seringkali sejarawan dihadapkan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau skeptis. Peneliti menggunakan kritik sumber terhadap sumber-sumber sekunder yang berupa buku-buku yang telah diperoleh dalam tahap mencari dan mengumpulkan sumber (heuristik), kritik sumber dilakukan terhadap sumber sekunder yaitu buku dan sumber-sumber penunjang lainnya. Sjamsuddin (1996: 118) menjelaskan bahwa fungsi kritik sumber bagi sejarawan erat kaitannya

T. Bahagia Kesuma, 2012

dengan tujuan sejarawan itu dalam mencari kebenaran. Kritik tersebut secara garis besar dibagi dua, yaitu kritik intern (internal) dan kritik ekstern (eksternal). Tahap pertama dalam kritik sumber yaitu kritik eksternal yang kemudian dilanjutkan dengan kritik internal. Dengan kritik ini akan memudahkan dalam penulisan karya ilmiah yang benar-benar objektif tanpa rekayasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Adapun kritik yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

3.2.2.2.1. Kritik Eksternal

Kritik eksternal merupakan suatu cara untuk melakukan pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah yang digunakan, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Penulis melakukan kritik sumber baik terhadap sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik eksternal terhadap sumber tertulis dilakukan dengan cara memilih buku-buku yang ada dengan permasalahan yang dikaji.

Kritik eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah. Dalam melakukan kritik eksternal terhadap sumber-sumber tertulis yang berupa buku-buku itu, peneliti tidak menelitinya secara ketat, hanya mengklasifikasikannya dari aspek latar belakang penulis buku tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melihat keotentisitasnya sehubungan dengan tema penulisan skripsi ini. Selain itu, tahun terbit dimana semakin terbaru angka tahunnya semakin baik karena setiap saat terjadi perubahan dan penerbit serta tempat di mana buku itu diterbitkan untuk melihat spesialisasi

T. Bahagia Kesuma, 2012

tema-tema buku yang dikeluarkan oleh penerbit tersebut, serta tentu saja kepopuleran dari penerbit juga diperhitungkan sehingga tingkat kepercayaan kepada isi buku tersebut semakin tinggi.

Kritik eksternal tersebut dilakukan diantaranya terhadap berjudul Pondasi Menuju Perdamaian; Catatan Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh buku karya Ferry Mursyidan Baldan yang diterbitkan oleh Suara Bebas. Buku tersebut sangat berguna karena banyak mendeskripsikan peristiwa penting yang dialami selama proses pembahasan RUU PA hingga disahkan menjadi UU Pemerintahan Aceh. Buku ini menjelaskan mengenai proses yang terjadi di dalam pansus RUU PA yang dipimpin oleh Ferry Mursyidan baldan. Kesaksian ini merupakan yang dialami langsung oleh penulis buku ini. Kriteria fisik buku ini juga masih sangat bagus diterbitkan setahun setelah UU PA itu disahkan yaitu tahun 2007. Mengenai kredibilitas dari penulis sendiri dapat dipertanggung jawabkan karena penulis buku tersebut merupakan pelaku utama pembahasan UU PA tersebut sehingga layak untuk dijadikan sebagai referensi skripsi ini

Berikutnya buku berjudul Bouraq-Singa Kontra Garuda : Pengaruh Sistem Lambang dalam Separatisme GAM terhadap RI. Penulis buku ini adalah Indra Jaya Piliang yang merupakan seorang sarjana dari jurusan ilmu sejarah salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Ia dikenal sebagai analis politik yang mengikuti, menyimak dan menganalisis perkembangan di bidang politik, otonomi daerah, resolusi konflik, *good governance*, perubahan sosial, korupsi, budaya, pertahanan, terorisme, masyarakat sipil. Penerbit buku ini yaitu Ombak yang

T. Bahagia Kesuma, 2012

merupakan salah satu penerbit yang sangat terkenal dalam buku-buku sejarah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 sehingga kondisi fisiknya masih bagus dan tidak begitu sulit bagi peneliti untuk mendapatkannya dan layak dijadikan sebagai referensi.

Buku berikutnya berjudul Pemberdayaan Siskamling dalam implementasi MoU Helsinki dan Provinsi NAD. Buku ini dikeluarkan oleh BRR NAD-NIAS. Pada buku ini terdapat data implementasi MoU Helsinki sampai dengan tahun 2006. Kondisi fisik bukunya pun masih baik dan diterbitkan pada tahun 2006 sehingga masih layak digunakan oleh peneliti. Buku ini diterbitkan oleh Satuan Kerja Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional BRR NAD-NIAS tetapi tidak dituliskan siapa penulis dari buku ini baik sebagai editor maupun sebagai penulis.

Berikutnya buku yang berjudul Duek Bersama Membangun Aceh Baru. Buku yang diterbitkan pada 2006 oleh BRR NAD-NIAS ini kondisinya masih bagus dan layak digunakan oleh peneliti karena didalamnya membahas mengenai keadaan Aceh pasca tsunami. Para penyusun buku ini pun yakni Wagimin, Harry S. Kadir dan Zulham anggota dari Satuan Kerja Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional BRR NAD-NIAS. Penyusun mengalami langsung proses diskusi yang dilakukan oleh satuan ini sehingga buku dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai bahan oleh peneliti.

Buku berikutnya buku yang berjudul Pemerintahan Daerah diterbitkan oleh Galia Indonesia. Buku setebal 328 halaman ini ditulis oleh Agussalim

T. Bahagia Kesuma, 2012

Gadjong, seorang doktor hukum yang kini masih aktif sebagai dosen. Beliau pun menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada lembaga Bantuan Hukum Trikora, Persatuan Sarjana Hukum Indonesia serta Jakarta Lawyer Club. Secara garis besarnya buku ini membahas mengenai landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan pemerintah daerah, konsep negara hukum serta konsep demokrasi analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan pada masa Reformasi. Buku ini terbit tahun 2007 dengan kondisi fisik buku yang masih bagus sehingga layak digunakan oleh peneliti mengenai peraturan mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia.

Buku yang ditulis oleh BRR NAD-Nias. BRR adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan keputusan presiden untuk melaksanakan tugas yang sifatnya mendesak dan membangun kembali Aceh melalui suatu badan setingkat dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Jadi BRR merupakan lembaga yang mengurus rekonstruksi kembali Aceh yang telah bergejolak. BRR merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menata dan merehabilitasi dari bermacam aspek sosial, politik dan keamanan karena Aceh sebagai daerah konflik dan daerah yang terkena bencana tsunami harus ditangani khusus dan dengan biaya khusus. Dengan demikian buku ini dapat dijadikan sumber yang terpercaya dalam memahami dinamika permasalahan Aceh dalam tahun 1999-2006.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Berkaitan dengan sumber koran, yang peneliti gunakan dalam mendapatkan informasi. Peneliti banyak menggunakan sumber dari koran Tempo. Tempo adalah media masa terkemuka di Indonesia. Semua tulisan di media tentu sudah melalui, sensor redaksi jadi berita yang disajikan dapat diambil sebagai bahan karena pers di lindungi oleh uu pers dengan kode etik dan diawasi oleh dewan pers jadi berita disajikan tentu sudah melalui data dan fakta yang dapat di pertanggungjawabkan. Sehingga, dengan demikian sumber dari media masa ini dapat digunakan dalam menambah informasi yang berkaitan dengan skripsi yang peneliti teliti, terutama pada masa 1999-2006.

Adapun kritik eksternal terhadap sumber lisan dilakukan dengan cara mengidentifikasi narasumber apakah mengetahui, mengalami, atau melihat peristiwa yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dari narasumber adalah usia, kesehatan baik mental maupun fisik, maupun kejujuran narasumber. Di sini penulis mewawancarai beberapa narasumber seperti Bapak Sayed Fuad Zakaria dan Bapak Nasir Djamil selaku Anggota DPR RI (2009-2014), Bapak T. Ali Basyah Talsya (Sejarawan dan budayawan Aceh), Bapak Wagimin (asistem menkopolhunkam dan mantan anggota BRR NAD), Bapak T. Iwan Kesuma (tokoh masyarakat Aceh), Bapak Abdullah Puteh (Mantan Gubernur Aceh), Bapak Badaruzzaman (ketua MAA), Bapak Teuku Kamaruzzaman (juru runding GAM), Bapak Kamal A.Arif, Bapak Rusli Ghalib, Bapak Said Aziz, Bapak T.M Ariadi, Bapak Zulkifli Zaini, Bapak M Daud Nurdin dan narasumber lainnya.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Kritik eksternal terhadap sumber lisan diantaranya terhadap bapak Rusli Ghalib. Beliau merupakan salah satu guru besar di Fakultas Ekonomi UNPAD. Beliau berusia 68 tahun. Beliau merupakan salah satu saksi sejarah dalam pergantian status darurat militer ke darurat sipil oleh karena itu beliau dapat dijadikan salah satu narasumber di dalam skripsi ini. Selain itu penulis mendapatkan analisa mengenai dinamika hubungan pusat dan Aceh dari sudut seorang guru besar Ekonomi. Walaupun beliau bertempat tinggal di Bandung tetapi selama periode tersebut beliau sering mengunjungi Aceh sehingga beliau mengalami dinamika yang terjadi pada periode 1999-2006.

Selanjutnya kritik eksternal terhadap sumber lisan terhadap Kamal A. Arif. Beliau merupakan ketua Dewan Pengurus Yayasan Bustanus Salatin dan dosen arsitektur UNPAR. Beliau berusia 58 tahun dan menulis sebuah buku yang berjudul Ragam Citra Kota Banda Aceh. Walaupun beliau merupakan doktor arsitektur pertama UNPAR, penulis beralasan bahwa beliau layak dijadikan sumber lisan mengenai skripsi ini karena Kamal A. Arif mengalami langsung proyek-proyek yang dialami selama 1999-2006 salah satunya pembangunan museum tsunami sehingga mengalami langsung bagaimana Aceh pada saat itu. Beliau juga sering mengunjungi Aceh karena beliau merupakan ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Jawa Barat. Informasi yang didapatkan dari beliau antara lain mengenai situasi Aceh pada saat dijadikan Daerah Operasi Militer dan Aceh Pasca Tsunami.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Kritik selanjutnya dilakukan terhadap Abdullah Puteh. Beliau layak dijadikan sebagai sumber lisan skripsi karena beliau merupakan Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2000-2004. Beliau juga mengetahui dinamika-dinamika yang terjadi antara Pusat dan Aceh. Selain itu beliau juga yang mengusulkan untuk digantikannya status Darurat Militer ke Darurat Sipil. Banyak hal yang kita dapatkan dari beliau karena beliau merupakan salah satu pelaku utama di dalam skripsi ini.

Kritik selanjutnya dilakukan terhadap Teuku Kamaruzzaman. Beliau merupakan salah satu eks GAM dan juru runding GAM. Relevan untuk dijadikan sebagai referensi karena beliau salah satu pelaku sejarah perdamaian Aceh dan ketua tim pengawas UU Pemerintahan Aceh. Sehingga informasi yang di dapatkan dapat mewakili sudut pandang eks GAM menanggapi dinamika yang terjadi pada periode 1999-2006.

Kritik selanjutnya dilakukan terhadap Muhammad Daud Nurdin. Beliau berumur 35 tahun dan merupakan dosen di Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe. Beliau merupakan saksi sejarah terhadap adanya gerakan SIRA yang menuntut referendum di Aceh. Sebagai dosen di Lhokseumawe beliau mengalami langsung bagaimana keadaan situasi masyarakat Aceh pada saat konflik.

Kritik selanjutnya dilakukan terhadap Nasir Djamil. Beliau merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014. Polotisi PKS ini layak dijadikan sebagai referensi karena beliau merupakan saksi utama dalam perubahan status yang

T. Bahagia Kesuma, 2012

terjadi di Aceh seperti disahkannya RUU PA menjadi UU PA. Beliau juga memahami alasan-alasan dari pergantian status yang terjadi di Provinsi Aceh sehingga beliau layak dijadikan referensi dalam skripsi ini.

3.2.2.2. Kritik Internal

Setelah melakukan kritik eksternal, langkah selanjutnya melakukan kritik internal. Kritik internal dilakukan oleh peneliti untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh untuk selanjutnya dijadikan penelitian skripsi ini. Kritik internal yang dilakukan peneliti diawali ketika memperoleh sumber, membaca secara keseluruhan isi sumber kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang telah dibaca oleh peneliti terlebih dahulu. Namun, terhadap sumber yang berupa arsip tidak dilakukan kritik dengan anggapan bahwa telah ada lembaga yang berwenang untuk melakukannya. Dari hasil perbandingan itu, maka akan diperoleh kepastian bahwa sumber tersebut bisa digunakan karena sesuai dengan topik kajian. Buku-buku yang peneliti lakukan kritik internal diantaranya adalah sebagai berikut;

Kritik internal terhadap buku yang dikeluarkan oleh BRR NAD-NIAS (2006). Dalam buku yang berjudul *Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat di Provinsi NAD* ini diuraikan mengenai dialog publik yang dapat menggambarkan bagaimana situasi NAD pada saat itu yang dilakukan di beberapa Kabupaten yaitu Kab Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab Aceh Tengah, dan Kab. Bener Meriah. Dalam buku ini BRR melakukan dialog publik di berbagai daerah itu dengan melibatkan berbagai elemen termasuk salah satunya masyarakat. Masyarakat

T. Bahagia Kesuma, 2012

dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya mengenai hasil dari MoU Helsinki “Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan pusat untuk menyelesaikan permasalahan Aceh, baik dengan Jeda Kemanusiaan (CoHA) dan perundingan-perundingan lainnya tetapi belum bisa menciptakan perdamaian, rakyat semakin sengsara, pembangunan tidak berjalan. Namun Peristiwa tsunami 26 Desember 2004 merupakan musibah yang luar biasa sepanjang peradaban dunia. Tsunami yang terjadi di Aceh merupakan suatu tanda dari Tuhan yang menyadarkan segenap elemen bangsa Indonesia baik pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat untuk segera mencari solusi bagi perdamaian yang abadi di Aceh. Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara adil, jujur, dan bermartabat, itulah yang kemudian dituangkan dalam MoU Helsinki. Setelah adanya perdamaian, terjadilah perubahan. Kita tidak lagi takut-takut melaksanakan aktivitas, tempat-tempat yang dulu merupakan daerah rawan sekarang bebas dilalui masyarakat.

Peneliti berpandangan bahwa situasi Aceh pasca tsunami berangsur pulih dengan adanya MoU Helsinki. Masyarakat telah kembali berani melakukan aktivitasnya seperti biasa, peristiwa tsunami memberikan simpati dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

Buku selanjutnya yang menguatkan mengenai situasi masyarakat Aceh pada saat itu yaitu buku yang berjudul *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* karya Harry Kaliwarang (2008). Dalam buku ini penulis mendapatkan berbagai informasi mengenai hal yang berhubungan dengan judul yang penulis

T. Bahagia Kesuma, 2012

tulis. Dalam pembahasannya menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintahan untuk menanggapi permasalahan di Aceh GAM tetap menuntut kemerdekaan dan Pemerintah Pusat dengan tegas mengatakan tidak membiarkan Aceh lepas dari Republik Indonesia. Pertemuan penting antara RI-GAM yang dilakukan di kota Bavois, Swiss. Pada 12 Mei 2000 ditanda tangani secara tertutup suatu Nota kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*).

Walaupun nota kesepahaman bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh sudah ditandatangani di Bavois dengan berbagai perangkat untuk memperkuat pelaksanaan, hal ini tidak membuat situasi Aceh semakin membaik, aksi kekerasan tetap saja berlanjut oleh kedua pihak. Setiap minggu terjadi kontak senjata antara RI dan GAM walaupun telah ditanda tangani nota kesepahaman tersebut, kerusakan pos-pos militer, rumah-rumah penduduk dan terbunuhnya orang-orang sipil hingga tokoh yang memiliki kepedulian tinggi mewujudkan perdamaian di Aceh juga ikut menjadi korban. Perjanjian yang difasilitasi oleh HDC ini gagal total.

Buku selanjutnya yang menguatkan hal tersebut yaitu penulis jadikan sebagai referensi ialah buku yang berjudul *Bouraq-Singa kontra Garuda : Pengaruh Sistem Lambang dalam Separatisme GAM terhadap RI* karya Indra Jaya Piliang (2010). Ketika tsunami menghantam Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang menyebabkan ratusan ribu korban. Pasca Tsunami tekanan dunia internasional semakin gencar dan kuat. Secara perlahan memaksa pemerintahan

T. Bahagia Kesuma, 2012

Indonesia untuk membuka pintu dialog kembali. Sebelum tsunami, sudah dilakukan beberapa upaya perdamaian yang difasilitasi dialog oleh *Henry Dunant Center* (HDC). Hanya saja segera terlihat betapa *CoHA* itu tidak memadai dan gagal membuat suatu perubahan yang besar di kehidupan bermasyarakat Aceh, sehingga secara perlahan memunculkan pelanggaran oleh kedua belah pihak. Karena dialog sebelumnya mengalami kegagalan Martti Ahtisaari, ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiatives* dan Mantan Presiden Finlandia melakukan upaya untuk berunding kembali kedua belah pihak. Dialog kedua ini menghasilkan Nota Kesepahaman antara RI dan GAM yang ditanda tangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

Peneliti berpendapat bahwa beberapa kali perjanjian dilakukan terdapat kegagalan karena belum menemukan titik penyelesaian dan belum sesuai dengan yang mereka harapkan sehingga menyebabkan *CoHA* tersebut gagal atau tidak berlangsung lama,

Buku selanjutnya buku yang berjudul *Duek Bersama Membangun Aceh Baru* yang diterbitkan oleh BRR NAD-NIAS (2006). Buku ini merupakan catatan dari *Talk Show* di TVRI NAD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional BRR NAD-NIAS. Buku yang dihasilkan dari hasil tayangan *talk show* yang ditayangkan setiap Sabtu jam 18.00-19.00. Buku ini membahas 3 bagian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu mengenai perdamaian Aceh adalah suatu karunia, undang-undang pemerinthan Aceh sebagai pintu gerbang menata Aceh baru dan

T. Bahagia Kesuma, 2012

menemukan kembali arah demokrasi. Masyarakat menyambut baik manfaat dari MoU Helsinki ini dirasakan oleh masyarakat dan kita sudah melihat sekarang masyarakat sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan bahkan sampai malam hari, padahal pada masa konflik masyarakat lebih banyak berdiam di rumah. Dimasa konflik bagaimana kita memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, kantor camat saja tidak buka.

Berhubungan dengan sumber yang ditulis oleh BRR NAD-Nias yang berupa dialog interaktif di TV dan RRI dapat dipertanggung jawabkan karena suatu dialog interaktif dalam mencari solusi penyelesaian masalah yang pernah timbul baik dari segi sosial, politik dan keamanan. Dialog ini sangat diperlukan untuk mencari solusi jalan terbaik dengan melibatkan semua pihak agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan tepat waktu sehingga masalah-masalah yang dulunya buntu menjadi cair dalam suasana damai, aman dan saling menghargai. Sehingga sumber tersebut dapat digunakan, tidak ada bedanya dengan wawancara penulis dengan tokoh-tokoh, dimana jika metode wawancara hasilnya di dapat langsung dari sumber yang berkompeten sedangkan jika hasil interaktif penulis mengutip dari hasil tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. BRR yang memprakasai dalam setiap dialog adalah lembaga pemerintahan, sehingga peneliti merasa sudah sepantasnya dikutip, dan dapat dipergunakan dalam melengkapi tulisan agar lebih kongkrit. Selain itu yang menjadi nara sumber di dalam dialog tersebut merupakan tokoh-tokoh yang berkompeten di dalam materi di dalam

T. Bahagia Kesuma, 2012

dialog tersebut contohnya Irwandi Yusuf (Senior Representative GAM), Prof. Dr. Yusni Sabi (Rektor IAIN Ar Raniri), H. Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh), dan tokoh-tokoh lainnya. Peneliti berpendapat pada saat sebelum MoU Helsinki tersebut ditandatangani, masyarakat takut untuk keluar dari rumah karena situasi pada saat itu sangat tegang. Sumber yang berupa dialog interaktif ini dapat dijadikan sumber dalam skripsi ini.

Buku selanjutnya buku karya seorang politis yang berasal dari Aceh yaitu Ferry Mursyidan Baldan (2007) yang berjudul *Pondasi Menuju Perdamaian Abad: catatan pembahasan RUU Pemerintahan Aceh*.

Undang-undang Pemerintahan Aceh (PA) merupakan salah satu implementasi dari nota kesepahaman atau Mou Helsinki. Sebagai pengganti dari UU Otonomi Khusus Aceh, penyusunan draft RUU dan kemudian pembahasannya di DPR jauh lebih intensif proses komunikasi dan persuasinya, baik sesama *stakeholder*. Mengenai kedudukan dari UU PA tersebut dalam NKRI penulis mendapatkan informasi yang sangat mendalam karena yang membuat buku ini merupakan ketua PANSUS RUU PA. Adanya Rancangan UU Pemerintahan Aceh banyak menimbulkan kecurigaan bahwa ini dapat membahayakan status Aceh di dalam NKRI pada masa yang akan datang dan dengan adanya UU PA ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial di daerah lainnya. Ungkapan tersebut ditepis oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta) yang juga memiliki kekhususan seperti Aceh. Yogyakarta bisa menerima bila RUU ini memberikan hak lebih istimewa kepada

T. Bahagia Kesuma, 2012

Aceh. Walaupun DI Yogyakarta juga merupakan daerah istimewa tetapi menurut Sultan Hamengkubuwono X iri hati karena daerah lain tidak memiliki sumber daya alam yang memadai seperti Aceh. Daerah-daerah lain tersebut bisa minta pembagian hasil pajak industri misalnya, tetapi hal itu tidak dilakukan. Sebab ukuran keadilan bukan pada keuangan, tetapi lebih pada jaminan kedamaian. Sultan juga menilai RUU-PA tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ia justru berharap jika telah disahkan. UU ini kelak akan mewarnai NKRI dan dapat menumbuhkan rasa damai di kalangan rakyat Aceh.

Adapun kritik internal terhadap sumber lisan dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antara narasumber yang satu dengan narasumber lainnya. Sehingga penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006. Sebagai contoh penulis membandingkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Rusli Ghalib, Bapak M Daud Nurdin selaku Tokoh masyarakat Aceh Bandung dengan para wakil Rakyat Aceh di DPR RI Bapak Nasir Djamil, Sayed Fuad Zakaria dan mantan eks GAM yang diwakili oleh bapak Teuku Kamaruzzaman dan dari pihak pemerintah oleh Bapak Abdullah Puteh (mantan Gubernur Aceh), Bapak Wagimin (asisten Menkopolkam) Dari hasil wawancara mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006. Setelah penulis

T. Bahagia Kesuma, 2012

melakukan uji banding pendapat narasumber yang satu dengan yang lainnya kemudian membandingkan pendapat narasumber dengan sumber tertulis. Kaji banding ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran fakta yang didapat dari sumber tertulis maupun sumber lisan dalam penelitian ini.

Kritik internal terhadap sumber lisan diantaranya terhadap Muhammad Daud Nurdin. Beliau mengatakan bahwa UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berbeda dengan keputusan PM Indonesia No. 1/MISSI/1959 yang menetapkan daerah Swatantra Tingkat 1 Aceh sejak 16 Mei 1959 menjadi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu beliau menegaskan peristiwa tsunami menjadi suatu hikmah membuka mata dunia agar Aceh dapat damai yang setelah sekian lama mengalami konflik.

Ungkapan tersebut dikuatkan oleh Rusli Ghalib menyatakan bahwa yang dikeluarkan tahun 1959 itu bukan undang-undang belum disertai dengan anggaran yang jelas sehingga pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU No 44 tahun 1999 untuk menguatkan kembali keistimewaan Aceh di tiga bidang yaitu agama, adat dan budaya. Peristiwa tsunami menjadi suatu tolak sejarah dalam sejarah Aceh dimana dalam waktu yang singkat sekitar 150 ribu masyarakat Aceh meninggal dunia dan ribuan luka baik lahir dan batin sehingga membuat kedua belah pihak GAM dan RI menyetujui untuk melakukan perdamaian di Aceh.

3.2.2.3. Interpretasi (Penafsiran Sumber)

T. Bahagia Kesuma, 2012

Tahap interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh agar dapat memiliki makna. Langkah awal yang dilakukan oleh penulis dalam tahap ini adalah mengolah, menyusun dan menafsirkan fakta yang telah teruji kebenarannya. Kemudian fakta yang telah diperoleh tersebut dirangkaikan dan dihubungkan sehingga menjadi suatu kesatuan yang selaras dimana peristiwa satu dimasukkan ke dalam konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya (Ismaun, 2005: 131). Dengan kegiatan ini maka akan diperoleh suatu gambaran terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Untuk mempertajam analisis terhadap permasalahan yang dikaji serta agar penulis dapat mengungkapkan suatu peristiwa sejarah secara utuh dan menyeluruh maka digunakan pendekatan interdisipliner pada tahap interpretasi ini. Pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini berarti ilmu sejarah dijadikan sebagai disiplin ilmu utama dalam mengkaji permasalahan dengan dibantu oleh disiplin ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik dan sosiologi. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji dan memudahkan dalam proses menafsirkan.

3.2.2.4. Penulisan Laporan Penelitian (Historiografi)

Tahap selanjutnya dari proses penelitian ini adalah penulisan laporan penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penulisan karya ilmiah ini atau disebut juga historiografi. Historiografi merupakan langkah akhir dari keseluruhan prosedur penulisan karya ilmiah sejarah, yang merupakan kegiatan intelektual dan cara utama dalam memahami sejarah (Sjamsuddin, 2007: 153). Tahap ini

merupakan hasil dari upaya penulis dalam mengerahkan kemampuan menganalisis dan mengkritisi sumber yang diperoleh dan kemudian dihasilkan sintesis dari penelitiannya yang terwujud dalam penulisan skripsi dengan judul berjudul *Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian terhadap Kondisi Sosial Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”*.

Seperti yang diungkapkan Hasan Usman dalam Abdurrahman (1999: 67-68) bahwa terdapat beberapa syarat umum yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam melakukan pemaparan sejarah, yaitu:

1. Peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa secara baik, agar data dapat dipaparkan seperti apa adanya atau seperti yang dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasa yang khas.
2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena ia didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan lain, penulisan itu ditempatkannya sesuai dengan perjalanan sejarah.
3. Menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca.
4. Keseluruhan pemaparan sejarah haruslah argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau

T. Bahagia Kesuma, 2012

itu didasarkan pada bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap dan detail fakta yang akurat.

Pada tahap ini seluruh hasil penelitian yang berupa data-data dan fakta-fakta yang telah mengalami proses heuristik, kritik dan interpretasi dituangkan oleh penulis ke dalam bentuk tulisan. Dalam historiografi ini penulis mencoba untuk mensintesis dan menghubungkan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada sehingga menjadi suatu penulisan sejarah.

3.3. Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari keseluruhan langkah-langkah penelitian. Dalam metode historis, langkah ini dinamakan historiografi. Laporan penelitian ini disusun secara kronologis sebagai alat memahami bagaimana peristiwa itu terjadi. Selain itu, laporan penelitian ini disusun berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Laporan Buku, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi) (2007) yang diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia. Sistematika penulisan dibagi menjadi lima bagian yang memuat pendahuluan, telaah kepustakaan, metode dan teknik penelitian, pembahasan dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I, peneliti akan membahas mengenai latar belakang masalah yang didalamnya termuat mengenai alasan dan pentingnya penelitian mengenai “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah : “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari

T. Bahagia Kesuma, 2012

1999-2006”. Pada bab ini juga membahas mengenai perumusan dan pembatasan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan untuk memudahkan peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II, peneliti akan membahas ini mengenai tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis dari berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Untuk mengkaji dan memahami serta menganalisis sejauh mana pembahasan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini serta pendekatan yang digunakan untuk melihat dinamika hubungan Pemerintahan Pusat dan Aceh.

Bab III Metodologi Penelitian : Bab ini membahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan sistematika penulisannya. Semua prosedur dalam penelitian akan di bahas pada bab ini.

BAB IV “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Aceh dari 1999-2006” : Bab ini merupakan isi utama dari tulisan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan alasan status Pemerintahan Aceh dalam NKRI telah berkali-kali berganti. Kondisi sosial, politik dan keamanan masyarakat Aceh pada saat status Pemerintahan itu di diganti dari mulai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ke UU Pemerintahan Aceh disahkan. Realisasi

T. Bahagia Kesuma, 2012

pelaksanaan status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masyarakat Aceh. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai pengaruh pergantian dan pelaksanaan status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masyarakat Aceh ditinjau dari aspek sosial, politik dan keamanan yang akan mencerminkan sebuah pasang surut. Semua hal tersebut tidak lepas dilihat dari kondisi masyarakat Aceh yang dapat mempengaruhi mengenai pengambilan keputusan oleh Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Aceh.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi : Bab ini mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan jawaban dari masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi peneliti tentang inti pembahasan. Rekomendasi ditujukan kepada lembaga yang berkaitan antara lain Pemerintahan Pusat, DPR RI, DPRA, eks GAM, Pemerintahan Daerah, Masyarakat Aceh dan Peneliti Selanjutnya.

Selain hasil penelitian, dalam historiografi ini juga termuat mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti. Daftar Pustaka merupakan kegiatan yang mencantumkan semua sumber tertulis (buku, artikel internet, koran dan jurnal). Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut. Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi satu karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan pembaca, setiap lampiran diberi nomor urut sesuai dengan urutan penggunaannya dan diberi judul. Riwayat hidup memuat informasi nama

T. Bahagia Kesuma, 2012

lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, prestasi-prestasi yang pernah dicapai dan ditulis dalam bentuk uraian singkat.

3.3.1. Teknik Penulisan Laporan

Cara penulisan laporan penelitian ini diarahkan oleh fokus atau pusat pembahasan dimana dalam teknik penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistem Harvard. Penggunaan sistem ini digunakan peneliti karena disesuaikan dengan hal yang lazim digunakan akademisi Universitas Pendidikan Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini penggunaan sistem Harvard, peneliti merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan UPI(2007).

3.3.2. Langkah-Langkah Penulisan Laporan

Langkah penulisan skripsi ini, dibagi dalam tahap awal dan tahap akhir (tahap penulisan yang sebenarnya). Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan materi dan kategorisasi data. Upaya pengumpulan sumber dilakukan peneliti sejak Oktober 2010 hingga merasa mendapatkan referensi yang cukup. Untuk penulisan ini, data yang dipakai dalam setiap bagian atau bab, terdapat perbedaan sesuai dengan titik berat pembahasan dan pokok tujuan tertentu dari tiap bab. Tahap penulisan terakhir akan dilakukan setelah materi atau bahan tersusun dan kerangka tulisan dibuat. Tulisan dilakukan dengan cara bab demi bab sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan secara bertahap. Penulisan skripsi ini dimulai setelah Seminar Pra-Rancangan Penulisan Skripsi. Penulisan pada bulan

T. Bahagia Kesuma, 2012

Oktober 2010 dan proses ini dilakukan dengan berbagai masukan dari Pembimbing I dan II.



T. Bahagia Kesuma, 2012